PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

RENCANA KERJA TAHUN 2022

(PERUBAHAN KEDUA)

DPMPTSP

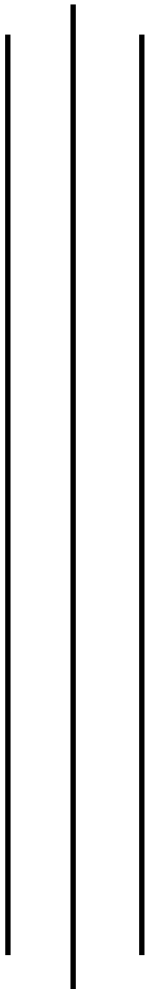
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

dpmptsp@sragenkab.go.id
dpmptsp.sragen@gmail.com

0271 892348
0271 8961359

www.dpmptsp.sragenkab.go.id

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022
(PERUBAHAN KEDUA)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen Tahun 2022.

Perubahan Renja ini sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2022. Dalam dokumen ini dijabarkan berbagai rencana program dan kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Sragen, 16 Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRI WULAN II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Tri Wulan II 8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15
BAB IV PENUTUP 22

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Bagan Alur Renja SKPD 3

Gambar 1.2 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah..... 4

Tabel II.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 s/d Tri Wulan II 10

Tabel III.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 16

BAB I
PENDAHULUAN

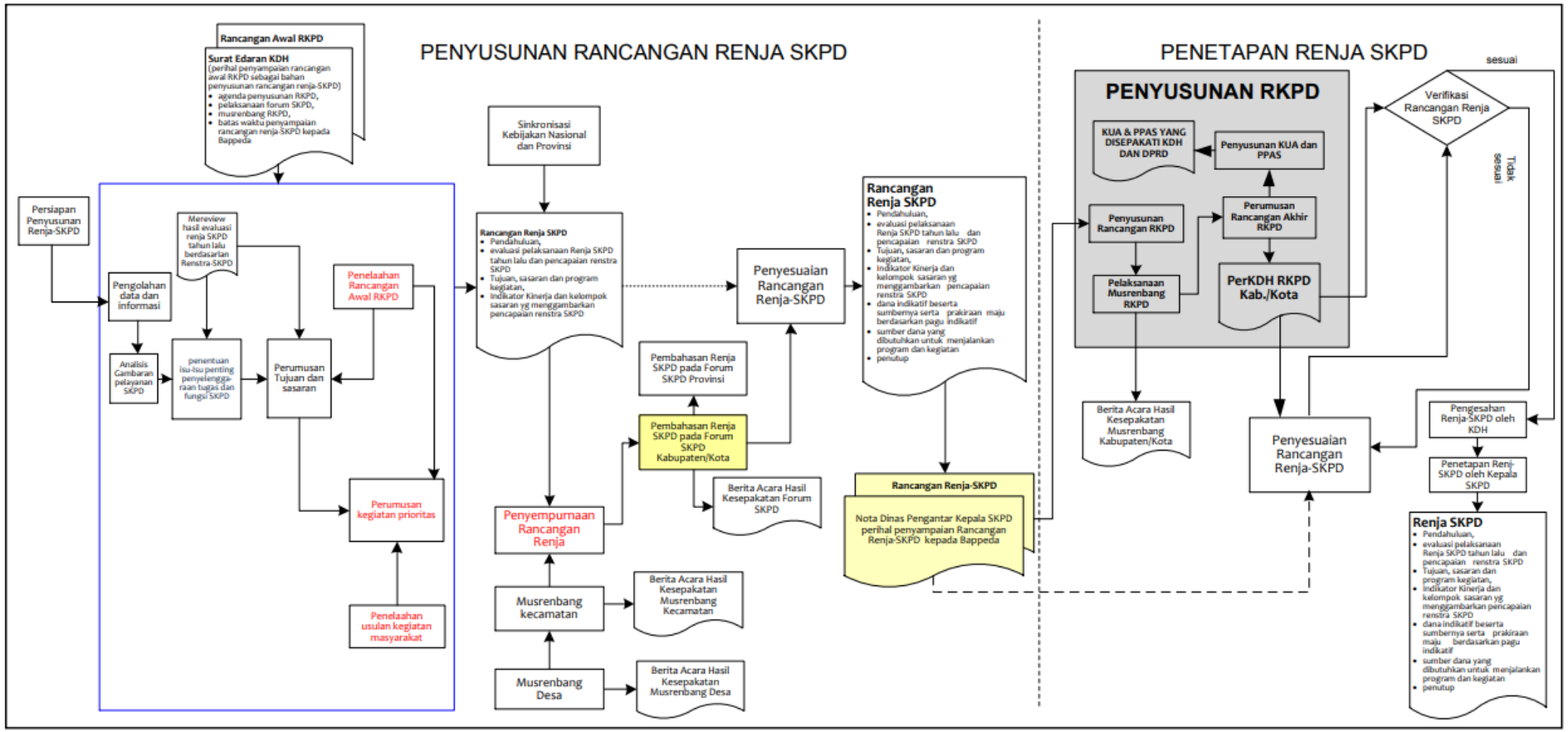
1.1.Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Tahun 2022 adalah tahun pertama periode RPJMD Bupati terpilih, maka penyusunan renja sebagai dokumen perencanaan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022. Renja ini memuat program dan kegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah-arah pedoman terhadap semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2022. Renja ini disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini, sehingga nantinya rencana kerja yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Prinsip Penyusunan:

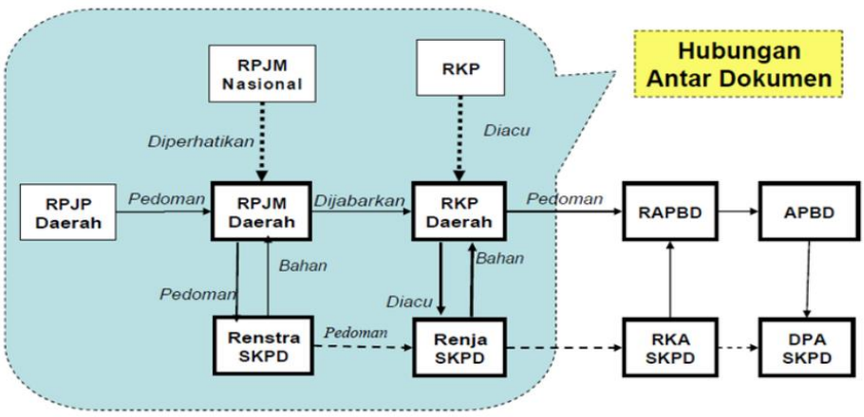
1. Substansi renja disesuaikan dengan renstra.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja merupakan dokumen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana.



Gambar 1.1

Bagan alur penyusunan renja

Renja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan penyhusunan rencana kerja dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan renja tahun 2022 didasarkan pada :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

r. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

s. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

t. Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2022 dimaksudkan ;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2022 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan penyusunan perubahan renja Tahun 2022 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/ strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan rencana kerja tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Latar Belakang

1.1 Landasan Hukum

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 Tri Wulan II

2.1 **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s/d Tri Wulan II**

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s/d Tri Wulan II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu, pada tahun 2022 melaksanakan 6 program dengan 11 kegiatan dan 30 Subkegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.977.328.546 dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 2.056.717.227 atau 27,70 % dan realisasi belanja langsung Rp. 842.483.051. Hal ini belum sesuai dengan rata-rata capaian setiap tri wulan, disebabkan terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi keuangannya karena pelaksanaan anggaran direncanakan pada triwulan III dan IV.

Tabel. II.1
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 s/d Tri Wulan II

No	Indikator inerja	Satuan	Target	Capaian
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp trilyun	1,5	1,1
2	Jumlah PMA PMDN	investor	1250	2553

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022	
						I		II			
1	2	3	4	5		6		7		8	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.977.328.546**		**681.154.441**		**2.056.717.227**		**27,70**
2.18	**Meningkatnya investasi daerah**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**6.977.328.546**		**681.154.441**		**2.056.717.227**		**27,70**
2.18.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah [%]**	**100**	**5.916.528.546**	**25**	**652.725.441**	**50**	**1.764.488.227**	**50,00**	**28,78**
2.18.01.2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah [bulan]	12	4.082.794.301	3	552.954.598	6	1.475.234.176	50,00	36,13
2.18.01.2,02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN [bulan]	14	4.082.794.301	3	552.954.598	7	1.475.234.176	50,00	36,13
2.18.01.2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [dokumen]	1	48.436.000	1	25.892.500	1	25.892.500	100,00	37,50
2.18.01.2,05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah unit pakaian dinas dan atribut yang disediakan [stel]	38	34.520.000	31	25.892.500	31	25.892.500	81,58	75,01

1	2	3	4	5		6		7		8	
2.18.01.2,05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tugas fungsinya [orang]	4	13.916.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.18.01.2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	12	1.131.655.245	3	29.993.320	6	148.536.777	50,00	29,74
2.18.01.2,06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik [bulan]	12	26.735.245	3	5.761.000	6	7.720.000	50,00	28,88
2.18.01.2,06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan perlengkapan kantor [bulan]	12	718.564.000	3	0	6	51.868.000	50,00	7,22
2.18.01.2,06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan penyediaan makan minum [bulan]	12	72.798.000	3	10.344.000	6	18.962.000	50,00	26,05
2.18.01.2,06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan [bulan]	12	118.852.000	3	0	6	30.776.000	50,00	25,89
2.18.01.2,06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan [bulan]	12	3.600.000	3	0	6	900.000	50,00	25,00
2.18.01.2,06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah [bulan]	12	100.000.000	3	7.888.320	6	26.310.777	50,00	26,31
2.18.01.2,06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah bulan penyediaan jasa penataausahaan arsip [bulan]	12	12.172.000	3	6.000.000	6	12.000.000	50,00	98,59
2.18.01.2,06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah bulan dukungan pelaksanaan SPBE [bulan]	12	78.934.000	0	0	6	0	50,00	0,00
2.18.01.2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	1	261.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.18.01.2,07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel [paket/unit]	1	261.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5		6		7		8	
2.18.01.2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	12	197.801.000	3	22.921.355	6	66.628.303	50,00	34,97
2.18.01.2,08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat [bulan]	12	1.199.000	3	0	6	600.000	50,00	50,04
2.18.01.2,08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik [bulan]	12	38.944.000	3	6.186.355	6	12.410.803	50,00	31,87
2.18.01.2,08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor [bulan]	12	27.739.000	3	0	6	5.885.000	50,00	21,22
2.18.01.2,08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa tenaga harian lepas [bulan]	12	129.919.000	3	16.735.000	6	47.732.500	50,00	36,74
2.18.01.2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	2	194.842.000	2	20.963.668	2	48.196.471	100,00	19,27
2.18.01.2,09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas [bulan]	12	180.000.000	3	20.963.668	6	43.911.471	50,00	24,40
			jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas [unit]	25		4		10		40,00	
2.18.01.2,09.05		Pemeliharaan Mebel	jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor [bulan]	12	2.022.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.18.01.2,09.10		Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lainnya [bulan]	12	12.820.000	3	0	6	4.285.000	50,00	33,42
Rata-rata capaian kinerja (%)						**25,00**	**11,68**	**25,00**	**11,68**	**50,00**	**28,78**
Predikat kinerja						**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**
2.18.02		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**30**	**100.000.000**	**0**	**0**	**5**	**9.184.500**	**5,00**	**9,18**

1	2	3	4	5		6		7		8	
2.18.02.2,02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	1	100.000.000	0	0	1	9.184.500	100,00	9,18
2.18.02.2,02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	pemetaan profil penanaman modal [perusahaan]	400	100.000.000	0	0	350	9.184.500	87,50	9,18
Rata-rata capaian kinerja (%)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,67**	**9,18**
Predikat kinerja						**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**
2.18.03		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**20**	**152.000.000**	**0**	**0**	**0**	**31.465.500**	**0,00**	**20,70**
2.18.03.2,01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah even promosi [kali]	2	152.000.000	0	0	1	31.465.500	50,00	20,70
2.18.03.2,01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	pameran/forum investasi [kali]	2	152.000.000	0	0	1	31.465.500	50,00	20,70
Rata-rata capaian kinerja (%)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,70**
Predikat kinerja						**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**
2.18.04		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**82**	**385.927.000**	**86.75**	**23.429.000**	**86.5**	**155.349.500**	**86,50**	**33,90**
2.18.04.2,01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100	385.927.000	80	23.429.000	90	155.349.500	90,00	33,90
2.18.04.2,01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah permohonan OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota [NIB]	1125	92.334.000	1219	6.694.000	2553	17.759.000	226,93	19,23
			jumlah permohonan perizinan/nonperizinan melalui perizinan online [permohonan]	3000		947		2879		95,97	

1	2	3	4	5		6		7		8	
2.18.04.2,01.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah pemenuhan komitmen OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota [NIB]	500	173.593.000	101	16.735.000	139	54.350.500	27,80	31,31
			jumlah pemeriksaan dan verifikasi perizinan/nonperizinan [permohonan]	600		259		293		48,83	
2.18.04.2,01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah aduan ditindaklanjuti [aduan]	10	20.000.000	3	0	6	450.000	60,00	2,25
			jumlah pemohon layanan konsultasi dan infromasi [pemohon]	80		20		404		505,00	
			jumlah periode survei kepuasan masyarakat [kali]	2		0		1		50,00	
2.18.04.2,01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	fasilitasi perizinan umkm [orang]	150	100.000.000	86	0	144	82.790.000	96,00	82,79
Rata-rata capaian kinerja (%)						**105,79**	**4,22**	**105,79**	**4,22**	**105,49**	**33,90**
Predikat kinerja						**STS**	**SR**	**STS**	**SR**	**STS**	**SR**
2.18.05		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**8**	**402.873.000**	**7.5**	**5.000.000**	**7.5**	**94.279.500**	**7,50**	**27,13**
2.18.05.2,01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100	402.873.000	67	5.000.000	67	94.279.500	67,00	27,13
2.18.05.2,01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha [pelaku usaha]	60	81.000.000	0	0	17	19.014.000	28,33	23,47
2.18.05.2,01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah peserta bimbingan terknis perizinan berusaha [pelaku usaha]	280	227.873.000	0	5.000.000	64	35.470.000	22,86	15,57

1	2	3	4	5		6		7		8	
2.18.05.2,01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pengawasan perizinan penanaman modal [pelaku usaha]	100	94.000.000	30	0	48	39.795.500	48,00	42,34
Rata-rata capaian kinerja (%)						**93,75**	**0,73**	**93,75**	**0,73**	**93,75**	**27,13**
Predikat kinerja						**ST**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**
2.18.06		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**30**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.950.000**	**0,00**	**9,75**
2.18.06.2,01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	30	20.000.000	0	0	0	1.950.000	0,00	9,75
2.18.06.2,01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dokumen sistem informasi layanan publik [dokumen]	1	20.000.000	0	0	0	1.950.000	0,00	9,75
Rata-rata capaian kinerja (%)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,75**
Predikat kinerja						**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2022 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renja, visi dan misi Kabupaten Sragn yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian dan Pelaksnaaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Renja DPMPTSP Tahun 2022 terdapat 6 program dan 13 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan sumber dana lainnya yang sah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sesuai dengan usulan program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai berikut;

Tabel III.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
URUSAN : WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG : PENANAMAN MODAL

KODE					Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Keluaran	Target	Satuan	Penetapan APBD	Jumlah Anggaran Pergeseran	Bertambah / (Berkurang)	RKPD Setelah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP				**6.977.328.546**	**6.977.328.546**	**1.415.648.324**	**8.392.976.870**
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**				**5.916.528.546**	**5.916.528.546**	**1.254.916.324**	**7.171.444.870**
2	**18**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.082.794.301**	**4.082.794.301**	**-563.311.948**	**3.519.482.353**
2	18	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang/ bulan	4.082.794.301	4.082.794.301	-563.311.948	3.519.482.353
2	**18**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**48.436.000**	**48.436.000**	**-13.916.000**	**34.520.000**
				2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31	paket	34.520.000	34.520.000	0	34.520.000
				9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	orang	13.916.000	13.916.000	-13.916.000	0
2	**18**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.131.655.245**	**1.131.655.245**	**1.660.263.420**	**2.791.918.665**

1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	18	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	26.735.245	26.735.245	4.285.000	31.020.245
2	18	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	paket	718.564.000	718.564.000	1.762.662.420	2.481.226.420
2	18	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	72.798.000	72.798.000	0	72.798.000
2	18	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	118.852.000	118.852.000	2.250.000	121.102.000
2	18	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000
2	18	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	laporan	100.000.000	100.000.000	-30.000.000	70.000.000
2	18	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	dokumen	12.172.000	12.172.000	0	12.172.000
2	18	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	dokumen	78.934.000	78.934.000	-78.934.000	0
2	**18**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**261.000.000**	**261.000.000**	**158.654.000**	**419.654.000**
2	18	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	261.000.000	261.000.000	-20.300.000	240.700.000
2	18	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	42	unit	0	0	178.954.000	178.954.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**18**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**197.801.000**	**197.801.000**	**47.616.852**	**245.417.852**
2	18	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	1.199.000	1.199.000	0	1.199.000
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	38.944.000	38.944.000	41.578.852	80.522.852
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	laporan	27.739.000	27.739.000	8.657.000	36.396.000
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	129.919.000	129.919.000	-2.619.000	127.300.000
2	**18**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**194.842.000**	**194.842.000**	**-34.390.000**	**160.452.000**
2	18	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	unit	180.000.000	180.000.000	-36.000.000	144.000.000
2	18	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21	unit	2.022.000	2.022.000	0	2.022.000
2	18	1	2,09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	14	unit	12.820.000	12.820.000	1.610.000	14.430.000
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**100.000.000**
2	**18**	**2**	**2,02**		**Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota**				**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**100.000.000**
2	18	2	2,02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	dokumen	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**152.000.000**	**152.000.000**	**0**	**152.000.000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	**18**	**3**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**				**152.000.000**	**152.000.000**	**0**	**152.000.000**
2	18	3	2,01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	152.000.000	152.000.000	0	152.000.000
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**385.927.000**	**385.927.000**	**145.732.000**	**531.659.000**
2	**18**	**4**	**2,01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**				**385.927.000**	**385.927.000**	**145.732.000**	**531.659.000**
2	18	4	2,01	1	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1125	Pelaku Usaha	92.334.000	92.334.000	139.325.000	231.659.000
2	18	4	2,01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500	kegiatan usaha	173.593.000	173.593.000	6.407.000	180.000.000
2	18	4	2,01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	80	orang	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	18	4	2,01	4	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	150	kegiatan usaha	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**402.873.000**	**402.873.000**	**0**	**402.873.000**
2	**18**	**5**	**2,01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**				**402.873.000**	**402.873.000**	**0**	**402.873.000**
2	18	5	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60	kegiatan usaha	81.000.000	81.000.000	0	81.000.000
2	18	5	2,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	315	Pelaku Usaha	227.873.000	227.873.000	0	227.873.000
2	18	5	2,01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100	kegiatan usaha	94.000.000	94.000.000	0	94.000.000
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**20.000.000**	**20.000.000**	**15.000.000**	**35.000.000**
2	**18**	**6**	**2,01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah**				**20.000.000**	**20.000.000**	**15.000.000**	**35.000.000**

1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	18	6	2,01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	Dokumen	20.000.000	20.000.000	15.000.000	35.000.000

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Renja ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja untuk tahun 2022, sebagai tindak lanjut atas Perubahan RKPD Tahun 2022.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Perlu menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis.
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif, sehingga, apabila terjadi kekurangan anggaran, maka dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan diupakayan tetap dapat mendukung pencapaian target kinerja.

Renja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Besar harapan kami agar dokumen renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam

mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah daerah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan rencana kerja ke depan.

Demikian Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2022 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sragen, Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010